

IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DESA DAN KELURAHAN (PPIDK) DALAM PEMBANGUNAN  
LISTRIK DESA TERBANGIANG TAHUN 2015

(Studi kasus : Desa Terbangiang Kecamatan Bdr. Petalangan.Riau)

APRIZAL FARLY

20110520047

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

55183

[Aprizalfarly@yahoo.com](mailto:Aprizalfarly@yahoo.com)

081275867576

**SINOPSIS**

Skripsi ini mengambil judul “Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Dalam Pembangunan Jaringan Listrik Desa Terbangiang Tahun 2015” sebagaimana diketahui bahwa listrik merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Terbangiang. Pembangunan infrastruktur yang belum merata dan juga banyaknya permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan jaringan listrik desa dan kelurahan. maka dari itu pemerintah daerah kabupaten pelalawan melaksanakan program ini dengan harapan mampu membantu percepatan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan peran aktif masyarakat di desa dan kelurahan. Studi ini merupakan deskripsi dan analisis terkait pelaksanaan program PPIDK dalam pembangunan jaringan listrik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program PPIDK dalam pembangunan jaringan listrik Desa Terbangiang tahun 2015 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program PPIDK dalam pembangunan jaringan listrik Desa Terbangiang tahun 2015.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kesuatu yang bersifat umum, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak antara peneliti dan subjek peneliti. Penggunaan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil wawancara, dokumentasi dan data yang terkumpul lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengimplementasian program PPIDK ini sudah sesuai prosedur, hal ini ditunjukkan dengan sudah terpasangnya jaringan listrik di Desa Terbangiang. Hal ini didukung oleh komunikasi yang terarah, sumberdaya dan anggaran dana yang sudah jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, program ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menghambat implementasi dari program ini yaitu faktor internal dan eksternal dimana faktor internalnya dipengaruhi oleh SDM yang masih belum berkualitas, anggaran dana yang terbatas, sarana dan prasarana

yang kurang mendukung serta kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam membantu pelaksanaan dari program ini. Sedangkan dari faktor eksternal adalah sulitnya negosiasi pembebasan lahan. Karena di dalam program ini tidak ada anggaran biaya untuk ganti rugi lahan, sehingga berdampak kepada proses pengimplementasian program ini. Mengakibatkan keterlambatan masuknya aliran listrik di Desa Terbangiang.

Saran yang penulis sajikan untuk mensukseskan program ini adalah dengan cara peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya sangat diperlukan, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya anggaran, sosialisasi program yang intensif kepada masyarakat sangatlah diperlukan.

## PENDAHULUAN

Perkembangan otonomi daerah dan pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya.

pembangunan infrastruktur di desa menjadi aspek yang penting untuk menjawab permasalahan pembangunan desa. Infrastruktur juga memegang peranan yang penting sebagai salah satu penggerak roda perekonomian untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur dalam pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Akan tetapi kesenjangan pembangunan infrastruktur dan masih banyaknya masyarakat miskin menjadi permasalahan yang cukup serius bagi pemerintahan daerah Kabupaten Pelalawan.

Di kabupaten Pelalawan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa kelurahan salah satunya dilakukan melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Kelurahan (PPIDK) Mandiri Kebijakan ini menitik beratkan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan untuk Desa Terbangiang. Dalam pelaksanaan program PPIDK Desa Terbangiang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur aliran listrik. Program ini dikerjakan dengan melibatkan peran pemerintahan desa serta ke-aktif masyarakat setempat.

Hal ini juga dapat menunjang kegiatan ekonomi kerakyatan, berfungsi mengatasi pengangguran dan membuka kesempatan kerja serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.

Alasan lain program PPIDK Mandiri ini adalah bahwa selama ini pelaksanaan pembangunan oleh kontraktor dari luar Desa/Kelurahan kurang memberikan dampak yang signifikan dalam membangkitkan dan menggerakkan perekonomian Desa/Kelurahan. Hal ini dikarenakan sebagian besar uang pembangunan infrastruktur tersebut akan dibawa dan digunakan di luar Desa/Kelurahan yang bersangkutan setelah pekerjaan itu selesai. Oleh karena itu Pemerintah kabupaten Pelalawan menggulirkan Program PPIDK Mandiri ini

untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat desa/kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur yang bersifat sederhana dan dapat dikerjakan dengan menggunakan peralatan yang relatif sederhana serta sesuai kebutuhan yang paling mendesak di Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Dalam aplikasi di lapangan, berbasis pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi dan memobilisasi masyarakat dalam melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur desa/kelurahannya. Dengan pola ini, masyarakat sudah dilibatkan sejak awal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, termasuk mengevaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan. Sehingga masyarakat tempatan benar-benar dilibatkan secara utuh. program PPIDK ini mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun dan memanfaatkan infrastruktur desa/kelurahan serta menimbulkan kesadaran memelihara infrastruktur yang ada.

Berdasarkan data yang Penulis dapatkan melalui media massa (News.okezone.com). Bahwa baru lima desa dan satu kelurahan di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang telah mendapatkan penerangan listrik. Masih ada beberapa desa lainnya yang belum menikmati aliran listrik seperti yang diungkapkan Camat Bandar Petalangan, Amri Juharza, dikutip dari riaumandiri, di Kecamatan Bandar Petalangan terdapat 10 desa dan satu kelurahan. "Lima desa dan satu kelurahan telah mendapatkan penerangan listrik. Masih ada beberapa desa lagi yang belum, akhir tahun ini seluruhnya sudah teraliri listrik. Yaitu, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Terbangiang dan Desa tambun. Jaringan listrik untuk beberapa desa

tersebut dibangun dengan dana APBD Pelalawan melalui program PPIDK. Sebelum dibangun jaringan listrik, masyarakat di Bandar Petalangan masih menggunakan genset desa (PLTD), dengan penerangan waktu terbatas. Dari ke lima desa tersebut peneliti memfokuskan Desa Terbangiang sebagai objek penelitian.

Sejauh ini proses pemasangan aliran listrik di Desa Terbangiang masih belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat Desa Terbangiang, hal ini disebabkan oleh keterlambatan masuknya aliran listrik dibanding desa-desa lain yang pembangunannya secara serentak sudah lebih dulu menikmati aliran listrik PLN. Dengan terlambatnya pembangunan jaringan listrik ini tentu akan menghambat usaha dan kegiatan masyarakat setempat. Dari apa yang telah dijabarkan di atas terkait program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) serta permasalahan yang ada maka penulis disini menyuguhkan judul skripsi "*Implementasi Program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Kabupaten Pelalawan Dalam Pembangunan Listrik Desa Terbangiang Tahun 2015*"

## **A. Metode penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian perlu diketahui tentang metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam rangka analisis dan interpretasi data yang ada. Metodologi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2002, h.27) penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara

induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak peneliti dan subjek penelitian.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Terbangiang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dengan didasarkan atas keinginan mengetahui secara jelas bagaimana Peran Pemerintahan Desa Terbangiang dalam Program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Tahun 2015.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Data Primer**

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data pada subyek informasi yang dicari. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan beberapa responden terkait tujuan penelitian ini.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder dari penelitian ini diambil oleh penulis dari berbagai media cetak maupun elektronik dan berbagai laporan-laporan dari pihak terkait. Data ini diperoleh dari

dokumentasi dan laporan-laporan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## **4. Teknik pengumpulan data**

Sesuai bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah :

### **1. Wawancara**

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan dilakukan berulang pada informan yang sama yaitu aparat pelaksana dan masyarakat penerima pelayanan. Pertanyaan yang diajukan bisa semakin terfokus sehingga informasi yang bisa dikumpulkan rinci dan mendalam.

### **2. Dokumentasi**

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat di lokasi penelitian yakni di Desa Terbangiang.

## **5. Unit Analisis**

Unit analisis berisi tentang penegasan unit atau kesatuan yang akan menjadi subjek penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan pokok pembahasan ini maka dalam pembahasannya akan melakukan kegiatan penyusunan yang akan menjadi unit-unit yang dianalisis, yaitu pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian yang diteliti, bisa suatu individu atau bisa juga suatu kelompok. Unit analisa dalam penelitian ini adalah orang di pemerintahan Desa Terbangiang, Masyarakat Desa Terbangiang dan organisasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta pihak-pihak yang terlibat dalam Program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Tahun 2015.

## **6. Teknik analisis data**

A. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam hal ini penulis akan menggunakan penelitian analisa kualitatif yang mana bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Karena penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka akan menggunakan analisis induktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kesuatu yang bersifat umum. Dari pengertian diatas, penggunaan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil wawancara, dokumentasi dan data yang terkumpul lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Desa Terbangiang**

#### **1. Standard dan Sasaran**

a). Kejelasan terkait dengan tujuan dan sasaran program PPIDK

Tujuan adalah hasil dari sasaran yang telah dibuat dan dilakukan sedangkan sasaran adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Kebijakan Program Percepatan pembangunan Infrastruktur Desa Kelurahan kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tahun 2015 Khususnya di Desa Terbangiang. bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pemasaran serta mengurangi isolasi daerah karena akan

berdampak penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan di Desa dan kelurahan.

PPIDK mempunyai kekuatan hukum yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor: 10 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/ Kelurahan (PPIDK) mandiri Kabupaten Pelalawan. Sejalan dengan diterbitkannya perbub No 10 Tahun 2013 pemerintah daerah kabupaten pelalawan sudah menjelaskan terkait tujuan dan sasaran tentang program PPIDK tersebut yaitu mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin dan perempuan terhadap pelayanan infrastruktur desa/kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik..

Sasaran utama dari program PPIDK adalah masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan dan menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan produksi pemasaran perekonomian masyarakat juga mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa yang dapat diterima oleh masyarakat, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas program ini sudah jelas karena dalam pelaksanaan program ini pemerintahan Desa Terbangiang mengacu pada perbub No 10 tahun 2013 yang menjadi landasan hukum dalam pembangunan infrastruktur di Desa Terbangiang tahun 2015.

#### **2.Sumberdaya**

a). Kejelasan tugas yang dimiliki implementator terkait kebijakan PPIDK Terdapat 2 implementor yang mengimplementasikan kegiatan Ketenagaan Listrikan, yaitu TPK dan DISTAMBEN. Keterkaitan tugas implementor sudah jelas, yaitu sama-sama bertugas mengimplementasikan kegiatan ketenagaanlistrikan di Desa Terbangiang tetapi untuk spesifik ketugasan berbeda

karena DISTAMBEN sebagai implementator teknis dalam pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan memberikan rekomendasinya kepada TPK. Sedangkan TPK berperan sebagai implementator teknis dalam mensosialisasikan kepada masyarakat serta bertanggungjawab terhadap permasalahan di lapangan. Jadi DISTAMBEN dan TPK tidak bisa mengimplementasikan kegiatan ketenagalistrikan tanpa bekerjasama walaupun secara spesifik tugas kedua implementor berbeda tetapi untuk tujuan yang sama.

b.) Kejelasan terkait dengan sumber daya finansial atau anggaran

Sumberdaya finansial atau anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan jaringan Ketenagalistrikan sehingga menjadi hal yang penting. Terbatasnya dana operasional yang diberikan kepada implementor merupakan salah satu penyebab keterlambatan pelaksanaan pembangunan jaringan ketenagalistrikan Desa Terbangiang. Disamping kegiatan pembangunan jaringan tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Sesuai Renstra dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BPMPD ) bahwa untuk mencapai sasaran tersebut, program dan kegiatan direncanakan didanai melalui sumber pendanaan, yaitu APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 untuk Desa Terbangiang yaitu sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta). Dimana 5% dari dana tersebut digunakan Untuk biaya Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta). Meliputi :

c). Kejelasan terkait kuantitas, kualitas dan profesionalitas aparat pelaksana

Sumberdaya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan karena mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan, tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis

tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Ketersediaan sumberdaya merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah aparat pelaksana saja tidak mencukupi tetapi diperlukan juga aparat pelaksana yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Berkenaan dengan sumberdaya manusia, data yang di dapatkan Peneliti dari ketua Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) , terdiri 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki.

Dalam Pengerjaan Pembangunan jaringan listrik, TPK bekerja sama dengan pihak ketiga atau rekanan, yakni PT. Yoga Putra Bersaudara yang bergerak dibidang ketenaga listrikan. kuantitas aparat pelaksana di TPK , yaitu pengolah sebanyak 5 orang. Keterkaitan sumber daya manusia dalam kebijakan PPIDK ini tentu saja masih minim dan perlu adanya penambahan aparat pelaksana agar kebijakan PPIDK dapat terealisasikan dengan optimal dengan kuantitas aparat pelaksana TPK yang maksimal.

Terkait kualitas dan profesionalitas aparat pelaksana TPK PPIDK Desa Terbangiang belum semuanya memiliki kualitas dan profesionalitas yang tinggi tetapi dalam hal implementasi program PPIDK. Sebagian Tim Pelaksana Kegiatan PPIDK dapat dikatakan sudah berpengalaman dibidangnya tetapi masih membutuhkan kualitas yang lebih baik lagi dan membutuhkan pelatihan secara khusus dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga menjadi implementor teknis yang berkualitas serta profesionalitas. Perbedaan latar belakang pendidikan aparat pelaksana

juga mempengaruhi implementasi program PPIDK walaupun dengan koordinasi dan kerjasama aparat pelaksana tetap juga hasil pekerjaan belum sesuai dengan yang diharapkan. Selain dalam hal sumber daya manusia yang masih minim, sedangkan pada sisi kualitas dan profesionalitas aparat pelaksana yang ada masih perlu ditingkatkan melalui diklat teknis pelayanan prima agar aparat pelaksana memiliki kualitas dan profesionalitas yang tinggi dengan itu mendukung implementasi program PPIDK Desa Terbangiang.

### **3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas**

a). Kejelasan terkait kewenangan dalam Pengerjaan program PPIDK Desa Terbangiang

Dalam pengerjaan pembangunan listrik di Desa Terbangiang Tahun 2015, pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada 2 Instansi Pemerintah yang akan bekerja sama mengimplementasikan Program PPIDK, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN). BPMPD adalah instansi yang bertanggungjawab untuk mengurus seluruh kegiatan administrasi sedangkan DISTAMBEN bertugas sebagai implementator teknisnya yang nantinya memberikan rekomendasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kedua instansi pemerintah ini bekerjasama dalam mengurus Program PPIDK di Desa Terbangiang hanya dalam tugas berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Dalam hal ini, kewenangan Program PPIDK ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BPMPD ), tetapi khusus untuk pembangunan jaringan listrik BPMPD bekerja sama dengan DISTAMBEN untuk membantu TPK dalam pembangunan jaringan listrik di Desa Terbangiang. Jadi sudah jelas bahwa semua instansi ini tidak bisa berjalan sendiri dalam pengimplementasian program PPIDK Mandiri Tahun 2015 di

Desa Terbangiang karena saling berkaitan antar instansi.

b). Kejelasan terkait dengan bentuk sosialisasi yang dilakukan

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik harus disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Tahap-tahap sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa yaitu :

A. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan di Desa Terbangiang Tahun 2015 dipersiapkan dan dilaksanakan oleh kepala desa dan didampingi oleh Pendamping desa dan Tim Pengendali dari Kecamatan yaitu :

1. Sosialisasi tingkat desa

Sosialisai tingkat desa dalam upaya memperkenalkan atau menyebarkan informasi mengenai Program PPIDK Mandiri dengan mengundang masyarakat secara luas, unsur pemerintah kelurahan, BPD, lembaga / organisasi masyarakat ditingkat kelurahan.

B. Tahap Perencanaan

Dalam menentukan penetapan rencana pembangunan sampai pengambilan keputusan dilakukanlah musyawarah desa dengan tujuan agar rencana pembangunan dan tahap pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, yang dianggap bisa bermanfaat dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Selain itu masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan yang dilakukan jika mereka merasa dilibatkan dalam segala prosesnya. Dalam perencanaan termasuk dalam pengambilan keputusan jenis Infrastruktur apa yang akan dibangun di desa terbangiang ini dan juga sesuai dengan infrastruktur apa yang boleh dibangun dalam Program PPIDK Mandiri Tahun 2015 ini. partisipasi dan

musyawarah masyarakat sangat dibutuhkan dengan melakukan tahap awal dalam perencanaan yakni:

#### 1. Survey kampung sendiri

Survey kampung sendiri dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi kondisi kelurahan, kondisi kependudukan, kondisi pelayanan dan prasarana, sampai dengan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk penyusunan proposal kegiatan masyarakat. Survey kampung sendiri ini dilakukan oleh TPK bersama pendamping kelurahan serta relawan masyarakat dari masing-masing dusun, RW, dan RT

#### C. Tahap Pelaksanaan Fisik

Pembangunan yang dilakukan merupakan suatu proses perkembangan dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Selain dari partisipasi kritik dan saran yang diharapkan dari masyarakat dalam Program PPIDK Mandiri ini juga dibutuhkannya partisipasi berupa tenaga. Dimana bisa kita lihat dari tujuan program ini yakni salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin didesa / kelurahan. Bagaimana dijelaskan dari salah satu tujuan program ini tenaga yang dibutuhkan dalam pembangunan.

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Pada pelaksanaannya pembangunan jaringan tenaga listrik dilakukan secara bersama dengan membagi dua tim kerja agar terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien di Desa Terbangiang, karena pekerjaan dikerjakan di dua tempat yang berbeda pada waktu yang sama yakni di dusun satu terbangiang dan dusun dua sungai sadak, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun infrastruktur pembangunan jaringan listrik. beberapa dari mereka ada yang tidak peduli tentang pembangunan listrik. Sebagian Masyarakat menganggap program ini adalah proyek yang menguntungkan oknum tertentu sehingga kurang optimalnya penyelenggaraan Program PPIDK Tahun 2015 dan

kurangnya kesadaran masyarakat dikarenakan masyarakat ada yang belum tersentuh sosialisasi, himbuan, ataupun undangan yang ditujukan kepada masyarakat umum meskipun sebenarnya program ini ditujukan sasarannya kepada masyarakat didesa/kelurahan itu sendiri.

#### D. Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik

Tahap Kegiatan yang dilakukan dalam Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik adalah:

Musyawarah Kelurahan IV dilaksanakan setelah pelaksanaan fisik selesai atau pada batas waktu penyelesaian pekerjaan habis. Musyawarah ini merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan fisik dan serah terima hasil kegiatan infrastuktur yang telah dibangun di Desa Terbangiang Tahun 2015 yaitu Pembangunan jaringan listrik. Pemeliharaan Hasil Tahap paska pelaksanaan fisik merupakan upaya oleh masyarakat untuk menggunakan serta memelihara infrastruktur yang sudah dibangun secara optimal. Kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur kelurahan sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Pemeliharaan hasil-hasil pembangunan sangatlah penting karena bisa membuat hasil dari pembangunan yang telah dilakukan bisa bertahan dengan lama dan berkelanjutan. Serta dalam segi pemanfaatan infrastuktur apakah masyarakat memanfaatkan infrastuktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya berguna untuk masyarakat didesa. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan lancar dengan mengadakan Musyawarah Desa I guna membahas tentang Program yang dapat di dengarkan oleh masyarakat. Media sosialisasi implementor kepada masyarakat melalui media elektronik dan media cetak membantu implementor mensosialisasikan Program PPIDK.

#### 4. Karakteristik agen pelaksana

a). Kejelasan terkait karakter, fungsi dan peran aktor-aktor dalam Program



## Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Kelurahan

Implementor program PPIDK di Desa Terbangiang adalah TPK dan Tenaga ahli yang bertugas membantu implementatornya. Karakter agen pelaksana kebijakan yaitu harus bekerjasama antar agen pelaksana dan antar instansi karena program PPIDK ini tidak hanya diurus oleh satu instansi melainkan dua instansi sehingga karakter agen pelaksana dalam bekerjasama dan berpengalaman sangat penting.

Fungsi dan peran aktor dalam mengimplementasikan Program PPIDK berbeda karena instansi-instansi yang berkaitan tersebut memiliki fungsi dan perannya masing-masing. BPMPD adalah instansi yang bertanggung jawab atas terlaksana program dan memverifikasi Proposal serta LPJ TPK, dan memberikan surat rekomendasi kepada TPK untuk melaksanakan kegiatan di desa dan rekomendasi pencairan dana oleh TPK di BANK RIAU KEPRI. Fungsi Dinas Pertambangan dan energi ( DISTAMBEN ) adalah membantu TPK dalam hal teknis dilapangan seperti pembuatan RAB dan mensurvey mengukur jarak antar tiang serta pengurusan sertifikat laik operasi ( SLO ).

Terkait peran masing-masing implementor berbeda, agen pelaksana dari BPMPD terkait Program PPIDK mempunyai peran sebagai memverifikasi, memeriksa, dan memberikan izin serta memberi rekomendasi kepada tim pelaksana kegiatan ( TPK ) yang di bentuk oleh desa. sedangkan DISTAMBEN melalui tenaga ahlinya bertugas membantu TPK dalam mensurvey lapangan, menentukan pemasangan tiang beton, membantu dalam pembuatan RAB serta hal - hal teknis lainnya.

Peran agen pelaksana dari TPK dan Tenaga ahli dari DISTAMBEN berperan sebagai agen pelaksana teknis Program PPIDK yang mempunyai peran sebagai agen pelaksana survey, pengendalian, pengawasan. Walaupun TPK dan tenaga

ahli dalam Program PPIDK berperan sebagai implementor teknis namun hasil rekomendasi dari tenaga ahli sangat menentukan layak atau tidak layaknya program PPIDK khususnya pembangunan jaringan listrik di kabupaten pelalawan. sehingga peran kedua implementor ini sama-sama penting.

Karakter, fungsi dan peran aktor-aktor dalam Program PPIDK sudah jelas yang memiliki perbedaan setiap agen pelaksana di masing-masing instansi yang bersangkutan mengimplementasikan program PPIDK. Tidak ada karakter khusus untuk agen pelaksana program PPIDK seperti agen pelaksana harus memiliki latar pendidikan yang tinggi atau tidak. Peran masing-masing implementor sama-sama memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan Program PPIDK di Desa Terbangiang.

b). Kejelasan terkait relasi dan koordinasi antar implementator

Relasi dan koordinasi sangat penting dalam pengimplementasian program karena relasi dan koordinasi membuat komunikasi antar implementor menjadi lancar. Program PPIDK sendiri khususnya tentang ketenagalistrikan dalam relasi dan koordinasinya dilakukan oleh TPK dan Tim Ahli dari DISTAMBEN. Relasi dan koordinasi antara TPK dan Tim Ahli tetap berjalan lancar karena dalam Program PPIDK, kedua Instansi ini saling keterkaitan dan masing-masing sudah diberikan kewenangannya satu sama lain. Jadi, relasi dan koordinasi dalam Program PPIDK antara TPK dan Tim Ahli berjalan lancar dan kompak karena implementor program PPIDK saling berhubungan satu sama lain. Program PPIDK tidak akan terimplementasi jika tidak ada relasi dan koordinasi antara kedua implementor. Relasi dan koordinasi yang terjalin sudah baik antara TPK dan Tenaga Ahli dalam mengimplementasikan Program PPIDK di Desa Terbangiang.

## **5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

a). Kejelasan terkait dengan keadaan sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mempunyai pengaruh yang penting pada organisasi pelaksana karena lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan implementasi Pembangunan. Implementasi Kegiatan PPIDK dilihat dari kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat memang berpengaruh karena kebanyakan pemikiran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan PPIDK belum terbangun. Aspek sosial, masyarakat Desa Terbangun pada umumnya merupakan masyarakat tradisional yang masih memegang teguh budaya leluhur warisan nenek moyang dan menggunakan bahasa lokal dalam berkomunikasi, yaitu bahasa Melayu Petalangan. Keadaan sosial masyarakat Desa Terbangun masih berjalan dengan baik hingga sekarang dan menerima Program PPIDK yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Aspek ekonomi masyarakat Desa Terbangun menjadi aspek yang penting dalam pengimplementasian Program PPIDK karena pada umumnya pekerjaan masyarakat adalah petani walaupun begitu masyarakat tidak menolak adanya Program PPIDK tetapi faktor ekonomi membuat sebagian masyarakat belum tergerak untuk menghibahkan tanamannya yang berupa Pokok sawit dan karet yang dilewati jaringan listrik, karena sebagian besar masyarakat desa terbangun adalah petani kebun. Dalam aspek politik pemerintah membuat Perbub terkait PPIDK, yaitu Perbub Nomor 10 Tahun 2013 tentang Program PPIDK yang mana akan menjadi pedoman pemerintah mengimplementasikan Program PPIDK kepada masyarakat dan masyarakat bisa memberikan evaluasi kepada pemerintah dengan melihat Perbub tersebut jika ada kesalahan dalam pengimplementasian Program PPIDK. Selain pertanian mayoritas bekerja sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, buruh tidak dibayar/berusaha dengan dibantu buruh

tidak tetap, buruh/karyawan dengan penghasilan relatif tidak besar.

Hal tersebut diatas tentu cukup berdampak bagi implementasi kebijakan . Pada dasarnya masyarakat yang sudah terbuka dan berpenghasilan cukup relatif menerima kebijakan pembaruan yang dibuat oleh pemerintah dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kondisi sosial, ekonomi, politik masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi akan membantu dalam proses implementasi kebijakan karena program PPIDK dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. Selain itu kesadaran masyarakat tentang program PPIDK masih kurang kecuali memang masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas dan para tokoh masyarakat. Beberapa hal tersebut dapat menjadi alasan terhambatnya pembangunan jaringan listrik di Desa Terbangun.

b). Kejelasan terkait dengan keadaan kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan

Suatu program yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu masyarakat berkepentingan dan perlu memperhatikan program yang diputuskan oleh pemerintahnya. Mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama. Kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar persamaan kepentingan inilah yang kemudian disebut kelompok kepentingan. Dukungan kelompok-kelompok kepentingan sangat berguna dalam implementasi kebijakan karena ikut juga membantu terlaksananya kebijakan tersebut.

Kelompok-kelompok kepentingan ini bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat serta menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menguasai pemerintahan sedangkan hanya ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah dan kelompok kepentingan memegang peranan yang sangat besar dalam demokrasi. Jenis-jenis kelompok kepentingan ini menurut Gabriel a. Almond meliputi kelompok kepentingan Anomik, kelompok kepentingan Non-Asosiasional, kelompok Kepentingan Institusional atau kelembagaan, dan kelompok kepentingan Asosiasional. Dalam implementasi program PPIDK Mandiri Tahun 2015 di Desa Terbangiang, kelompok-kelompok kepentingan tersebut tidak ikut serta memberikan dukungannya bagi implementasi kebijakan.

Dalam hal ini dukungan kelompok-kelompok kepentingan terhadap Program PPIDK belum ada jadi pengimplementasian kebijakan tersebut dilaksanakan oleh TPK dan DISTAMBEN sebagai implementator teknis pemasangan jaringan listrik yang berwenang. Agar implementasi kebijakan berjalan lancar maka seharusnya ada dukungan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang mana akan membantu TPK dan DISTAMBEN dalam pengimplementasian program PPIDK serta menjadi tempat masyarakat memberikan evaluasi, saran atau masukan yang berguna untuk mengimplementasikan Program PPIDK di Desa Terbangiang.

#### **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Tahun 2015**

Dalam pengimplementasian pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Pengerjaan Jaringan Listrik di Desa Terbangiang. Peneliti uraikan dalam 2 indikator, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari implementor kebijakan PPIDK, yaitu:

a). Kejelasan terkait faktor internal implementasi program PPIDK

Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam yang mempengaruhi kebijakan Pembangunan Jaringan Listrik. Faktor internal dari implementor kebijakan PPIDK yaitu TPK pada dasarnya sama, kekurangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Operasional atau sarana/prasarana. Faktor internal dari TPK dalam mengimplementasikan program PPIDK adalah minimnya SDM yang belum memadai karena untuk menjadi panitia tim pelaksana kegiatan (TPK) tidak memiliki syarat khusus. Semua adalah hak prerogatif dari kepala desa selaku yang berwenang dalam memilih panitia TPK, dan juga dana untuk program PPIDK sangat minim. Pencairan dana dilakukan secara bertahap, dana operasional TPK hanya 5% dari dana yang ada dan bukan dikhususkan untuk keperluan operasional saja. Namun, dana tersebut juga digunakan untuk keperluan lain seperti biaya operasional tenaga ahli dari DISTAMBEN, pembuatan RAB, dan biaya pembersihan lahan yang dilalui jaringan listrik. Faktor lainnya, Tim Pelaksana Kegiatan tidak mempunyai perangkat komputer atau laptop yang memadai dan juga minimnya ketersediaan listrik dalam pengerjaan melengkapi administrasi.

Kebutuhan SDM serta sarana/prasarana menjadi faktor internal yang utama dalam implementasi program PPIDK dan juga menjadi salah satu alasan terhambatnya pembangunan jaringan listrik di Desa Terbangiang. Implementor program PPIDK tidak akan bisa melakukan tugasnya dengan baik jika tidak didukung oleh kuantitas SDM yang berkualitas.

b). Kejelasan terkait faktor eksternal implementasi Program PPIDK.

Faktor eksternal dalam implementasi program PPIDK merupakan faktor yang penting karena mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut. Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan PPIDK Mandiri Tahun 2015 Desa Terbangiang Untuk Pembangunan Jaringan Listrik adalah pembersihan lahan yang dilewati dari Desa Terbangiang untuk menuju jaringan induk melewati Desa Sari Muliya, yang mana warga Desa Sari Muliya tidak bersedia menghibahkan tanamannya seperti pokok sawit dan karet jika tidak diganti rugi. Sedangkan Dana yang didapat untuk pembangunan jaringan listrik di desa Terbangiang adalah dari Serapan APBD dan APBDP Kabupaten Pelalawan dalam program PPIDK Mandiri Desa Terbangiang Tahun 2015 tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan atau ganti rugi. Pembayaran ganti rugi memang menjadi faktor eksternal yang sangat mempengaruhi dalam mengimplementasikan Program PPIDK Desa Terbangiang untuk pembangunan jaringan Listrik. Penyelesaian sangketa lahan yang memakan waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan pembangunan jaringan listrik Desa Terbangiang menjadi terhambat. Seharusnya pemerintah mendukung untuk mengatasi hal semacam ini, karena faktor internal dan eksternal saling berkaitan satu sama lain. Dengan begitu implementor dapat melaksanakan implementasi Program PPIDK dengan optimal dan maksimal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang Peneliti lakukan dalam melihat implementasi Program PPIDK Mandiri Desa Terbangiang Tahun 2015 tentang pembangunan jaringan listrik, maka terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Standar/sasaran kebijakan tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Program PPIDK Mandiri

Tahun 2015 Desa Terbangiang sudah diimplementasikan oleh BPMPD, DISTAMBEN, DAN TPK dengan baik dan sesuai Perda yang berlaku.

2. Sumber daya yang dimiliki yaitu sumberdaya finansial bersumber pada APBD Kabupaten Pelalawan dan sumber daya manusia yakni kuantitas SDM yang dimiliki TPK dan DISTAMBEN masih minim akan tetapi secara kualitas serta profesionalitas staff atau pegawai yang ditempatkan sudah *credible*.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam mengimplementasikan Program PPIDK, Pemerintah Daerah melalui DISTAMBEN sepakat memanfaatkan bentuk sosialisasi melalui musyawarah Kabupaten dan Msyawarah Desa serta dengan menggunakan media cetak seperti Pelalawan Tribun , ditambah juga komunikasi secara langsung dengan masyarakat.

4. Karakteristik agen pelaksana berjalan baik sesuai isi Perbup 10 Tahun 2013 Tentang PPIDK dalam kebijakan mengimplementasikan Program PPIDK. Relasi dan koordinasi yang terjadi tetap terbangun dengan kompak antara TPK dan tenaga ahli dari DISTAMBEN karna saling berkaitan satu sama lain untuk bekerjasama mengimplementasikan program PPIDK Desa Terbangiang.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat dimana kondisi tersebut menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan karna pada umumnya pekerjaan masyarakat desa terbangiang adalah petani pekebun, yang mana berpengaruh pada tingkat kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran (*awareness*) belum terbangun sehingga sangat diperlukan bentuk sosialisasi (*awareness-raising*) dan edukasi yang lebih komunikatif dan efektif dari para implementator kepada masyarakat.

6. Faktor internal dalam implementasi program PPIDK ini ialah sumberdaya manusia atau aparat pelaksana yang minim, kurangnya sarana/prasarana yang

akan menunjang keberhasilan implementasi. faktor eksternalnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat melaksanakan pembangunan di Desa Terbangiang. Banyaknya oknum masyarakat yang tidak mau menghibahkan sebagian tanaman yang di lalui jaringan listrik, memaksa para implementator menghabiskan durasi waktu yang panjang dalam menyelesaikan pembangunan jaringan listrik di Desa Terbangiang.

## **B. Saran**

Adapun saran yang bisa dijadikan masukan dalam implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan Desa Terbangiang tahun 2015, adalah:

1. TPK yang sudah menyadari berbagai macam kekurangan yang menjadi faktor penghambat implementasi, seharusnya lebih aktif menindaklanjuti dan memproses permasalahan tersebut ke pemerintah daerah untuk meminta penambahan SDM yang berkualitas dan berpengalaman, serta penambahan sarana/prasarana agar implementasi berjalan optimal.
2. Mengupayakan secara berkelanjutan program-program *awareness-raising* berupa sosialisasi lewat pendekatan pendekatan persuasif misalnya dengan melakukan bimbingan teknis secara khusus kepada seluruh Tim Pelaksana Kegiatan untuk lebih memahami maksud dan tujuan dari program PPIDK tersebut.
3. Jika sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sarana/prasarana sudah terpenuhi dengan baik maka implementor dapat melaksanakan pekerjaan dengan optimal.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku-buku**

*Djumhana, Muhammad. 2005. Pengantar Hukum Keuangan Daerah. Bandung, Citra Aditya Bakti.*

*Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.*

*Handayaninrat, Soerwarno. 1994. Pengantar Ilmu Administrasi Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.*

*Kodoati, Robert, J. 2005. Pengaturan Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

*Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

*Moloeng, J. Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.*

*Miles, dan Hubberman. 1992 Analisis Data Kualitatif. Jakarta, Universitas Indonesia*

*Nugroho, Riant, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elek Media Komputindo*

*Suharno, 2013. Dasar-desa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Ombak Dua*

*Nugroho, Riant, 2009. Public Policy. Jakarta: PT Elek Media Komputindo*

### **B. Internet/publikasi ilmiah**

[http://www.riauonline.co.id/riau/kota-  
http://www.halloriau.com/read-pelalawan-  
78690-2016-03-19-para-](http://www.riauonline.co.id/riau/kota-<br/>http://www.halloriau.com/read-pelalawan-<br/>78690-2016-03-19-para-)

[http://portalriau.com/advertorial/kab-  
pelalawan/ppidk-mandiri-program-  
andalan-bupati-pelalawan](http://portalriau.com/advertorial/kab-<br/>pelalawan/ppidk-mandiri-program-<br/>andalan-bupati-pelalawan)

[pekanbaru/read/2016/05/11/program-  
pelalawan-lancar-menuju-pelalawan-  
emas.pendamping-kecamatan-dan-desa-  
di-pelalawan-tetap-digaji-12-bulan.html,](http://pekanbaru/read/2016/05/11/program-<br/>pelalawan-lancar-menuju-pelalawan-<br/>emas.pendamping-kecamatan-dan-desa-<br/>di-pelalawan-tetap-digaji-12-bulan.html)

*penulis : Andi Indrayanto, editor : Yusni  
Fatimah*

*News.okezone.com/ppidk/pelalawan*

### ***C. Peraturan***

*Perbub No 10 tahun 2013 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Bantuan  
Keuangan. Program Percepatan  
Pembangunan Infrastruktur Desa/  
Kelurahan (PPIDK) mandiri Kabupaten  
Pelalawan*

*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah dan  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa*

*Undang-Undang Pemerintahan desa  
Pemerintahan Desa berdasarkan PP No.  
47 Tahun 2015*